

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Dilema Jepang Sebagai Negara Industri Berteknologi Maju dalam Penanganan Isu Perubahan Iklim Global”**, karena menurut penulis judul ini sangat menarik untuk diangkat kedalam sebuah skripsi, dimana pembahasan isu perubahan iklim akhir-akhir ini menjadi topik utama dan banyak diperbincangkan, sehingga menjadi persoalan yang begitu serius bagi dunia. Apalagi disaat era revolusi teknologi dan industri yang sedang berkembang saat ini membuat negara-negara maju maupun berkembang saling bersaing untuk mencapai peningkatan ekonomi, sehingga sering kali melupakan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi, misalnya masalah lingkungan yakni perubahan iklim.

Selain alasan di atas, isu perubahan iklim tersebut menarik untuk dibahas dalam skripsi ini karena adanya keterkaitan yang cukup erat dalam penanganan isu perubahan iklim dengan kebijakan politis yang membuat negara-negara maju terutama Jepang merasa dilema.

Atas dasar itulah penulis memilih judul **“Dilema Jepang Sebagai Negara Industri Berteknologi Maju dalam Penanganan Isu Perubahan Iklim Global”** untuk diangkat kedalam sebuah skripsi. Dengan tujuan agar para pembaca nantinya akan mengerti dan memahami apa yang menjadi dasar pemerintah Jepang merasa dilema terhadap penanganan isu perubahan iklim tersebut. Selain itu, skripsi ini dibuat

sebagai salah satu syarat kelulusan akademik Strata 1, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.2 Latar Belakang Masalah

Saat ini, isu tentang perubahan iklim (*Climate Change*) menjadi sorotan utama bagi dunia internasional, hampir setiap negara menjadikan isu ini menjadi topik utama di dalam negeri masing-masing, tanpa terkecuali negara maju maupun yang sedang berkembang, negara kaya maupun negara dengan ekonomi rendah. Dimana semakin berkembangnya teknologi dan industri dunia, semakin besar pula dampak-dampak yang muncul dan menjadi masalah bagi dunia yang utama yakni masalah lingkungan.

Masalah lingkungan hidup ini dipicu juga oleh munculnya revolusi industri yang telah mengubah dunia menjadi lebih maju dan modern. Dalam perkembangannya, industrialisasi dipicu oleh revolusi teknologi informasi dan transformasi yang telah menghasilkan beberapa negara yang menguasai perekonomian dunia, dan hingga saat ini negara-negara tersebut masih berada paling depan dan nyaris tak tertandingi, diantaranya adalah Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Kanada, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang, atau lebih dikenal dengan sebutan Negara G-8.

Ancaman dari masalah lingkungan hidup seperti perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global yang bersumber dari meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia, kian hari makin dirasakan. Dimana suhu bumi mulai meningkat drastis, es di kutub utara mulai mencair, bencana alam

terjadi dimana-mana, dan masalah lingkungan lainnya.¹ Hal ini dapat berdampak pada sektor kehidupan manusia, seperti produksi pangan yang makin berkurang namun konsumsi semakin meningkat, serta penipisan sumber air akibat terjadinya kekeringan.

Keseriusan masalah perubahan iklim ini yang mendorong dibentuknya badan yang menangani masalah perubahan iklim, yakni UNFCCC (*United Nations Framework Conference on Climate Change*) pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 9 Mei 1992 di Rio de Janeiro.² Kemudian UNFCCC membentuk badan pertemuan tahunan yang disebut *Conference of the Parties* (COP). Pada saat pertemuan COP ketiga yang dilaksanakan di Kyoto, Jepang tahun 1997 terbentuklah sebuah perjanjian internasional yang berfokus dalam penanganan isu perubahan iklim dunia yang lebih dikenal dengan “Protokol Kyoto”.³

Dalam implementasinya, Protokol Kyoto mendapat dukungan dari Negara G-8 yang merupakan negara-negara maju di dunia. Akan tetapi dibalik beberapa negara G-8 yang mendukung Protokol Kyoto, adapula negara yang tidak mau terlibat dalam aksi penanganan isu perubahan iklim tersebut, seperti Amerika Serikat, Rusia, Kanada dan Jepang.⁴ Seperti yang kita tahu pula bahwa negara-negara tersebut merupakan negara yang memiliki teknologi dan industri maju yang dimana pastinya menyumbang emisi gas terbesar.

Konferensi UNFCCC ke 20 di Bonn Jerman terakhir pada 4-15 Juni 2014, terungkap fakta bahwa baru 11 negara yang meratifikasi perpanjangan Protokol

¹ BBC Indonesia. (2014, December 4). *Dunia: Dunia akan mencatat tahun terpanas pada 2014*.

Diakses pada September 2014, dari BBC Indonesia: <http://www.bbc.co.uk>

² Murdiyarso, D. (2003). *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*. Jakarta: Kompas., Hal 23

³ Ibid. Hal 30

⁴ Titiyoga, G. (2013, December 12). *Tekno: Negara Maju Dominasi Isu Perubahan Iklim*. Diakses pada 12 September 2014, dari TEMPO.CO: <http://www.tempo.co>

Kyoto Periode Komitmen Kedua.⁵ Beberapa negara maju menyatakan keluar dari kesepakatan Protokol Kyoto, salah satunya yang menolak Protokol Kyoto Periode Kedua adalah Jepang. Namun, Jepang lebih memilih berperan secara rutin dalam memberikan bantuan keuangan untuk menunjukkan kontribusinya terhadap isu perubahan iklim.⁶

Jepang tidak sepenuhnya mengikuti arah politik luar negeri Amerika Serikat dalam pengambilan kebijakan luar negerinya mengenai isu perubahan iklim. Dalam banyak hal, Amerika Serikat masih menjadi acuan bagi sikap politik Jepang. Di tahun 2002, Jepang pernah meninggalkan Amerika Serikat dan bergabung dengan negara Uni Eropa dalam meratifikasi Protokol Kyoto.⁷ Akan tetapi, langkah Jepang ini hanya terlihat sebagai upaya “pencitraan” Jepang dalam pergaulannya dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan Jepang dalam pembahasan awal target pengurangan emisi, menentang upaya pengurangan emisi karena MITI (*Ministry of International Trade and Industry*) berusaha melindungi industri domestik dan MNCs (*Multinational Corporations*) Jepang yang ada di beberapa negara di Asia.⁸

Sebelum Jepang meratifikasi Protokol Kyoto pada 4 Juni tahun 2002, Jepang mulai memperlihatkan kepeduliannya terhadap isu perubahan iklim dunia pada saat ekonomi Jepang sedang meningkat menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia, ketika itu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) baru membentuk UNFCCC pada tahun 1997. Akan tetapi, hal tersebut tidak bertahan lama karena krisis ekonomi tahun 1998 mulai

⁵ Fajar, J. (2014, June 22). *Lingkungan Hidup: Baru 11 Negara yang Meratifikasi Protokol Kyoto Periode Kedua*. Diakses pada 12 September 2014, dari Situs Berita dan Informasi Lingkungan: <http://www.mongabay.co.id>

⁶ Siej. (2011, December 5). *Lingkungan: Jepang Nyatakan Sikap Soal Protokol Kyoto dan Komitmen Kedua*. Diakses pada 12 September 2014, dari Lombok Sumbawa Online: <http://lomboknews.com>

⁷ *Kyoto Protocol on climate change*. (2011, April 4). Diakses pada 12 September 2014, dari Europa: <http://europa.eu>

⁹ MITI adalah *Ministry of International Trade and Industry*, pada tahun 2001 berubah menjadi METI: *Ministry of Economy, Trade and Industry*.

melanda Asia termasuk Jepang. Adanya tekanan krisis inilah akhirnya membuat Jepang mengendorkan keikutsertaannya terhadap isu perubahan iklim, dan berfokus pada penanganan krisis. Serta bagi Jepang, target penurunan emisi gas rumah kaca hingga 6% menjadi beban berat yang mempengaruhi kebijakan Jepang. Hal tersebut dikarenakan berkomitmen dalam masalah lingkungan akan mengorbankan sebagian kepentingan ekonomi jangka panjang, sebab untuk melaksanakan target penurunan emisi secara otomatis Jepang memerlukan beberapa program-program pembaharuan seperti pembaharuan sumber tenaga, program penurunan karbon dioksida terhadap industri dan program lainnya.⁹ Oleh karena itu, hingga saat ini Jepang masih merasa dilema akan keputusannya dalam penanganan isu perubahan iklim global.

Pada tanggal 3 Desember 2007, 174 negara telah meratifikasi protokol tersebut termasuk Jepang, Kanada, Tiongkok, India, Selandia Baru, Rusia dan 25 negara anggota Uni Eropa, serta Rumania dan Bulgaria. Akan tetapi walaupun Jepang telah meratifikasi Protokol Kyoto tersebut Jepang hanya memberikan bantuannya dalam penanganan dampak dari masalah perubahan iklim pada negara yang dikira membutuhkan bantuan rekontruksi, Jepang tidak ikut mengurangi emisi gas yang telah ditetapkan pada Protokol Kyoto.

1.3 Pokok Permasalahan

Dalam penjelasan latar belakanag diatas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah “Mengapa Jepang menghadapi dilema dalam berkomitmen pada Protokol Kyoto?”

⁹ Sarah, I. P. (2013). *Perubahan Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Protokol Kyoto*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 505.

1.4 Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjabarkan permasalahan di atas, diperlukan teori dan bantuan konsep jika diperlukan. Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan yang menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah.¹⁰

Konsep Diplomasi Lingkungan

Konsep Diplomasi Lingkungan ini berasal dari dua kata yaitu Diplomasi dan Lingkungan. Berikut ini pengertian diplomasi dan lingkungan:

Menurut S.L Roy, “Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain”. Secara konvensional, diplomasi diartikan sebagai salah satu usaha untuk memperjuangkan salah satu kepentingan nasionalnya di kalangan masyarakat internasional.¹¹

Berdasarkan pengertian dari undang-undang dasar No. 23 tahun 1997 menyatakan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Sedangkan menurut Harold dan Margaret Sprouts dalam teori Lingkungan “A Man Millieu Relationship” mengatakan bahwa:

¹⁰ Mas'ood, M. (1989). *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada. Hal 161

¹¹ K.J Holsti. (1978). *Internasional Politics A Frame Work For Analysis Third edition*. New Delhi: Practice Hall of India. Hal. 82-83

*“Faktor lingkungan sangat mempengaruhi suatu masyarakat politik dalam menentukan kebijakan politiknya. Masyarakat politik memiliki basis geografis untuk menerangkan tingkah laku politik. Masing-masing masyarakat politik terletak pada suatu wilayah yang merupakan kombinasi unik dalam hal lokasi, ukuran, bentuk, iklim, dan sumber-sumber alamnya. Disamping itu sebagian sumber aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber human dan non human.”*¹²

Menurut Andreas Pramudianto mendeskripsikan bahwa diplomasi dan lingkungan hidup merupakan istilah yang dapat dikaitkan dan berkembang menjadi Diplomasi Lingkungan (Environmental Diplomacy) sehingga pengertiannya menjadi:

*“Ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu lingkungan hidup untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan nasional (atau kepentingan dan kebijakan entitas bukan negara) terutama kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri dibidang lingkungan hidup suatu negara.”*¹³

Sehingga diplomasi lingkungan dapat mencakup dari persoalan pencemaran udara, pencemaran laut, perubahan iklim, keamanan hayati dan satwa hingga persoalan seperti nuklir, pembangunan berkelanjutan, sumber daya air, energy dan lain-lain.

Teori Politik Hijau (*Green Politics*)

Berdasarkan analisa dari Jackson dan Sorensen (2005) topik tentang lingkungan hidup memang menjadi semakin sering muncul dalam agenda

¹² James E. Dougherty, Robert I. Pfaltzgraf, Jr. (1990). *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey, Third edition*. New York: Harper Collins Publisher.

¹³ Pramudianto, A. (2008). *Diplomasi lingkungan: Teori dan Fakta*. Jakarta: UI-Press. Hal 20

internasional lebih dari tiga dekade terakhir.¹⁴ Sedangkan jumlah masyarakat seiring waktu pun semakin meningkat. Populasi global yang sangat cepat meningkat mengejar standar kehidupan yang lebih tinggi merupakan ancaman yang berpotensi terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan argumen dari kaum “ekoradikal” sebagai kaum ekstrimis dalam *green politics* yang mengkritisi pendapat dari kaum “modernis”, menurut mereka negara lebih merupakan masalah daripada sebagai solusi bagi problem lingkungan hidup. Karena negara adalah bagian dari masyarakat modern yang notabene adalah sebab dari krisis lingkungan hidup.¹⁵

Menurut Bryant dan Bailey bahwa ekologi politik fokus pada usaha mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi politik dari perubahan lingkungan hidup. Menurut Bryant asumsi pokok ekologi politik ialah perubahan lingkungan tidak bersifat netral, tetapi merupakan suatu bentuk politik lingkungan yang banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global.¹⁶

Menurut M. Watts, politik hijau adalah mempelajari relasi yang kompleks antara masyarakat dan lingkungan hidupnya melalui analisis yang cermat atas akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam serta implikasinya bagi kesehatan lingkungan dan keberlanjutan hidup. Sedangkan Hempel menjelaskan politik hijau adalah mempelajari saling-ketergantungan (*interdependence*) antara unit politik dan saling

¹⁴ Jackson, Robert dan Georg Sorensen. (2005). “*Lingkungan Hidup*” dalam *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁵ Carter, A. (1993). *Towards A Green Political Theory*, dalam A. Dobson dan P. Lucardie (eds.). *The Politics of Nature: Explorations in Green Political Theory*. London: Routledge..

¹⁶ Zulkifli, A. (2014, February 15). *Ling. Sosial: Politik Hijau atau Green Politics*. Diakses pada 16 Maret 2015, dari Consultant Lingkungan dan Energi: <http://www.bangazul.com>

keterkaitan (*inter-relationship*) antar unit politik dengan lingkungan hidupnya, terutama yang berkenaan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan.¹⁷

Pada dasarnya pemikiran *Green Politics* adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Keseimbangan tersebut berlandaskan pada *ecocentrisme*, yaitu suatu bentuk penolakan atas pandangan *anthropocentris* atas dunia.¹⁸ Ketika ketidakseimbangan terjadi, maka pada saat itulah kerusakan akan terjadi, istilahnya adalah *Katastrophe*, atau bencana.

Teori *Rational Choice*

Hugh Ward, melalui tulisannya yang berjudul *Rational Choice* mengatakan, “Rational-choice adalah bagian tak terpisahkan dari perangkat analisa para ilmuwan politik, karena banyak fenomena penting yang bisa dijelaskan, paling tidak secara parsial, dari perspektif ini.”¹⁹ Teori *rational choice* tidak terkait dengan posisi ideologis tertentu. Jika dilihat secara metodologis, *rational choice* berdiri pada posisi metodologi individualism. Artinya, *rational choice* memandang bahwa pemahaman terhadap fenomena sosial dibangun dari pemahaman terhadap preferensi, keyakinan, dan strategi individu. Tetapi, teori ini tidak serta merta hanya digunakan oleh para penganut paham individualism liberal.

Melalui analisa yang didasarkan premis-premis yang memandang optimis kapasitas nalar manusia untuk membangun dan menentukan pilihan serta kecenderungan manusia untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko, maka diharapkan perilaku manusia dalam konteks politik bisa dipahami, dijelaskan,

¹⁷ Ibid

¹⁸ *Anthropocentris* adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari alam semesta. Lingkungan dalam konteks ini hanya sebagai nilai instrumental, sebagai objek eksploitasi, dan eksperimen untuk kepentingan manusia.

¹⁹ Ward, Hugh (2002) “*Rational Choice*” dalam Marsh, David dan Gerry Stokker ed., “*Theory and Methods in Political Science*,” Palgrave McMillan

diprediksi, dan karenanya, direayasa secara lebih empirik. Misalnya, dengan menggunakan metode-metode ekonomi, maka akan bisa dijelaskan mengapa seseorang, atau sekelompok orang lebih memilih partai A dibanding partai B. Seseorang atau sekelompok orang tersebut memiliki kepentingan, dan mereka dihadapkan pada pilihan partai A atau partai B. Setelah dibandingkan dan dipertimbangkan, orang atau sekelompok orang tersebut berkesimpulan bahwa kepentingan mereka akan lebih terakomodasi jika partai A berkuasa, daripada jika partai B yang berkuasa. Dari situ akhirnya orang atau sekelompok orang tersebut memutuskan untuk memberikan dukungan mereka pada partai A. Ini sama ketika seseorang atau sekelompok orang dengan kebutuhan tertentu dihadapkan pada tawaran produk A atau produk B. Orang atau kelompok orang tersebut akan mencoba membandingkan, produk mana yang paling baik melayani kebutuhan mereka, dan pilihan akan dijatuhkan pada produk tersebut.

Dalam perkembangannya, melalui proses saling kritik, muncul banyak variasi pendekatan dalam teori *rational-choice*. Dunleavy mengidentifikasi empat pendekatan dominan dalam diskursus teori rational choice, yaitu pendekatan pluralis, pendekatan korporatis, pendekatan collective-action, dan pendekatan new-right.²⁰ Masing-masing pendekatan tersebut memiliki tafsir yang berbeda terhadap premis-premis utama *rational-choice*. Masing-masing dengan fokus dan penekanan yang berbeda.

Pendekatan pluralis mengasumsikan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka secara sukarela mereka akan memilih kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan bisa mengakomodasi

²⁰ Dunleavy, Patrick, (1991). *Democracy, Bureaucracy and Public Choice: Economic Explanations in Political Science*, UK: Harvester Wheatsheaf.

kepentingannya. Kelompok seperti inilah yang sering kita sebut sebagai interest group (kelompok kepentingan). Kelompok kepentingan ini menjadi fokus kajian utama dalam pendekatan pluralis. Dalam kelompok kepentingan ini diasumsikan bahwa relasi yang terjadi didalamnya didasarkan pada kesamaan kepentingan dan relasinya cenderung didasarkan pada kesukarelaan anggotanya. Keberadaan kelompok semacam ini juga sangat ditentukan oleh keterlibatan anggotanya dan cenderung hanya memfokuskan perhatian pada isu-isu spesifik yang sifatnya seringkali sangat praktis.

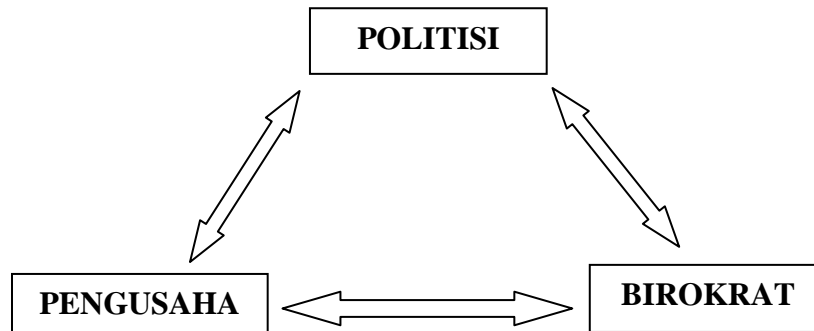
Pendekatan lain dalam *rational-choice* adalah pendekatan korporatis. Pendekatan korporatis ini mengakui dan menyepakati bahwa rutinitas pembuatan-kebijakan di negara-negara demokratis Barat beroperasi sebagaimana dipahami dan dijelaskan dalam pendekatan pluralis. Tetapi, pendekatan korporatis menambahkan bahwa dalam kenyataannya, kelompok-kelompok kepentingan tidak memberikan pengaruh yang setara, baik secara kualitas maupun kuantitas, terhadap proses kebijakan. Kelompok-kelompok kepentingan tertentu cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses kebijakan dibanding kelompok kepentingan yang lain.

Dunleavy mengilustrasikan penjelasan di atas dengan melihat perbedaan derajat pengaruh kelompok-kelompok kepentingan ekonomi utama-serikat buruh, asosiasi bisnis dan perdagangan besar dan asosiasi profesional.

Pendekatan lain yang paling mutakhir dalam diskursus *rational choice* adalah pendekatan *new-right*. Dalam pendekatan ini diperkenalkan konsep '*iron-triangle*', yang terdiri dari birokrat, pemimpin kelompok kepentingan besar, dan para legislator.

Ketiga komponen tersebutlah yang memiliki pengaruh yang besar didalam sistem politik Jepang.²¹

Gambar 1.1 Iron triangle



Sumber: disarikan dari Haffner John, Thomas Casas, Jean Pierre Lehman. Japan's Open future : An Agenda for Global Citizenship. 2009

Dalam gambar di atas menjelaskan bahwa Politisi, Birokrat serta Pengusaha merupakan pemegang kekuasaan di Jepang. Hal tersebut karena ketiga posisi tersebut merupakan peran kunci dalam membuat dan menghasilkan sebuah kebijakan. Dalam hal ini peran pengusaha didalam sistem politik Jepang cukup besar karena hubungan antara pengusaha, politisi dan birokrat cukup dekat dan saling mempengaruhi. Pengusaha memiliki kedekatan dengan Politikus dan Birokrat, hal tersebut membuat pengusaha memiliki peran penting didalam pengambilan keputusan di Jepang.

Iron-triangle ini memiliki *vested-interest* tersendiri, yang berbeda dengan kepentingan kelompok yang direpresentasikannya, dan akhirnya akan lebih menentukan dalam proses kebijakan yang berlangsung. Para aktor ini lebih mengejar *vested-interest* mereka daripada kepentingan kelompok yang direpresentasikannya. Proses kebijakan yang terjadi terinsulasi dari anggota kelompok yang lain.

²¹ Hafner John, et al. (2009). *Japan's Open future : An Agenda for Global Citizenship*. United Kingdom: Wimbledon Publishing Company. Hal 148

1.5 Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, serta kerangka dasar teori dan konsep yang digunakan maka dapat diambil jawaban sementara bahwa pemerintah Jepang menghadapi dilema dalam Protokol Kyoto adalah karena:

- Pada periode Protokol Kyoto Komitmen I, kondisi politik dalam negeri Jepang dalam proses pembuatan kebijakan untuk penanganan isu perubahan iklim tersebut, yang kemudian Jepang mengeluarkan keputusannya secara rasional dalam berkomitmen pada Protokol Kyoto Komitmen I, dan
- Pada periode perencanaan Protokol Kyoto Komitmen II, kemampuan ekonomi domestik Jepang serta aktor-aktor sektor ekonomi dan konteks internasional yakni negara-negara Annex I dan Non-Annex sangat berpengaruh terhadap pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

1.6 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian akan dibatasi agar mempermudah melakukan analisa. Dalam penulisan ini, jangka waktu yang akan dibahas berkisar pada awal dibentuknya Protokol Kyoto pada tahun 1997 sampai tahun 2012 dimana Jepang memikirkan kembali keikutsertaannya dalam Potokol Kyoto periode komitmen II (2013-2020). Serta penulisan ini hanya mencakup dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

1.7 Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan berdasarkan kerangka pemikiran atau teori yang kemudian ditarik suatu argumen yang akan dibuktikan melalui data-data empiris.

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Penulis juga memperoleh data yang terpaparkan dari internet yang merupakan isi hasil wawancara dari narasumber terpercaya. Selain itu, data-data yang ada juga didapatkan melalui penelusuran sumber-sumber para ahli dan tokoh politik yang mereka paparkan melalui penulisan buku maupun artikel ataupun jurnal online yang tersedia di Internet.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis membaginya berdasarkan sistematika berikut ini :

BAB I, Merupakan pendahuluan yang berisikan Alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Membahas secara umum mengenai Jepang. Kiprah Jepang dalam lingkungan global sebagai negara industri, serta membahas mengenai kemajuan maupun perkembangan industry Jepang

BAB III, Membahas mengenai isu perubahan iklim global, penanganan dan mekanisme konvensi perubahan iklim, dan membahas tentang Protokol Kyoto. Serta

membahas permasalahan lingkungan yang dialami Jepang hingga partisipasi Jepang dalam penanganan isu perubahan iklim.

BAB IV, Membahas dilema yang dialami Jepang dalam penanganan isu perubahan iklim global.

BAB V, Merupakan kesimpulan dari penjabaran dan analisa yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat oleh penulis.